

Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Depok 2021-2024

Alifia Rahmawati^{1*}, Muhamad Raihan², Rifky Syah Rezkty Lubis³, Siti Syilva Fadia⁴,
Zahwa Khairunnisa Asywaq⁵

¹⁻⁵Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana, Indonesia

*Penulis Korespondensi: 63231268@bsi.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the financial performance of the Depok City Government based on the Budget Realization Reports (Laporan Realisasi Anggaran/LRA) for the 2021–2024 period. The analysis focuses on evaluating the government's ability to manage Local Own-Source Revenue (Pendapatan Asli Daerah/PAD) and regional expenditures through the measurement of effectiveness and efficiency ratios. Sound regional financial management is an essential element in achieving good governance, transparency, accountability, and sustainable public service delivery. Therefore, assessing the realization of revenue and expenditure budgets is important to determine the extent to which financial targets have been achieved and resources have been utilized efficiently. This research employed a quantitative descriptive method using secondary data obtained from the Budget Realization Reports of the Depok City Government for the period 2021–2024. The data were analyzed using effectiveness and efficiency ratios and interpreted based on regional financial performance assessment criteria. The findings indicate that the effectiveness ratio improved significantly, increasing from 85% in 2021 (fairly effective) to 106% in 2022, 100% in 2023, and 107% in 2024 (highly effective). Meanwhile, the efficiency ratios were 96%, 98%, 104%, and 98%, respectively. These results suggest that regional expenditure management was generally quite efficient, although an inefficient condition occurred in 2023 when expenditure realization exceeded revenue realization. Overall, the financial performance of the Depok City Government demonstrated positive progress in revenue achievement and expenditure management throughout the study period.*

Keywords: Budget Realization Report; Effectiveness; Efficiency; Efficiency Ratio; Regional Financial Performance.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Depok berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) periode 2021–2024. Analisis dilakukan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja daerah melalui pengukuran rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, evaluasi terhadap LRA diperlukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan serta mengendalikan pengeluaran daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Depok tahun 2021–2024. Data dianalisis melalui perhitungan rasio efektivitas dan rasio efisiensi yang kemudian dibandingkan dengan kriteria penilaian kinerja keuangan daerah. Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah dalam merealisasikan target PAD, sedangkan rasio efisiensi digunakan untuk menilai tingkat optimalisasi penggunaan pendapatan dalam membiayai belanja daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Depok dari aspek efektivitas mengalami peningkatan yang sangat baik. Rasio efektivitas pada tahun 2021 sebesar 85% dengan kategori cukup efektif, kemudian meningkat menjadi 106% pada tahun 2022, 100% pada tahun 2023, dan 107% pada tahun 2024 yang termasuk kategori sangat efektif. Dari aspek efisiensi, rasio yang diperoleh pada tahun 2021 sebesar 96%, tahun 2022 sebesar 98%, tahun 2023 sebesar 104%, dan tahun 2024 sebesar 98%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan belanja daerah secara umum berada pada kategori cukup efisien, meskipun pada tahun 2023 terjadi kondisi tidak efisien karena realisasi belanja melebihi realisasi pendapatan.

Kata kunci: Efektivitas; Efisiensi; Kinerja Keuangan Daerah; Laporan Realisasi Anggaran; Rasio Efisiensi.

1. LATAR BELAKANG

Pemerintah daerah memiliki kewajiban konstitusional untuk mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah

diberikan kewenangan luas untuk mengatur sumber pendapatan dan pembiayaan pembangunan secara mandiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang berkualitas. Keberhasilan otonomi ini sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan keuangan daerah itu dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berfungsi sebagai instrumen utama dalam pelaksanaan program pembangunan daerah dan penyediaan layanan bagi masyarakat.

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang memuat seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang disusun secara sistematis berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam pelaksanaannya, APBD harus dikelola secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kinerja keuangan pemerintah merupakan representasi dari tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau kebijakan dalam rangka mencapai visi dan misi. Indikator utama untuk menilai keberhasilan tersebut adalah melalui laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, tertentu. Pengukuran kinerja melalui laporan keuangan tidak hanya berfungsi untuk mencatat pencapaian program, tetapi juga menjadi alat krusial untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan serta mendorong akuntabilitas publik (Cahyo, 2024).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam satu periode tertentu. Laporan ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBD. Analisis terhadap Laporan Realisasi Anggaran diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan dan mengelola belanja daerah secara efektif dan efisien. Selain itu, analisis LRA juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi pengelolaan anggaran, serta keserasian alokasi belanja daerah. Dengan melakukan evaluasi berkala terhadap LRA, pemerintah daerah dapat merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah di masa depan (Atiyyah & Fitria, 2024).

Dalam praktiknya, pengelolaan anggaran daerah di sejumlah wilayah di Indonesia tetap menemui berbagai hambatan, seperti rendahnya tingkat penyerapan anggaran, tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat, serta belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun-tahun

sebelumnya turut memengaruhi stabilitas keuangan daerah, termasuk perubahan prioritas belanja pemerintah daerah untuk penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi, dan perlindungan sosial masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menjaga stabilitas fiskal dan meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran secara berkelanjutan.

Kota Depok, sebagai salah satu daerah penyangga ibu kota, menghadapi tantangan berupa pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk yang terus meningkat secara signifikan. Kondisi ini secara otomatis meningkatkan tuntutan terhadap pemenuhan pelayanan publik, yang membutuhkan kemampuan pendanaan daerah yang kuat dan stabil. Periode tahun 2021–2024 merupakan fase krusial bagi Kota Depok karena mencakup masa pemulihan ekonomi serta penyesuaian kebijakan fiskal terhadap dinamika ekonomi nasional pasca-pandemi. Analisis pada rentang waktu ini sangat relevan untuk melihat sejauh mana kapasitas fiskal daerah dalam merespons kebutuhan pembangunan jangka menengah di tengah perubahan kondisi ekonomi makro. Evaluasi kinerja keuangan pada periode ini akan memberikan gambaran nyata mengenai ketahanan dan kemampuan adaptasi fiskal Pemerintah Kota Depok.

Penelitian mengenai analisis Laporan Realisasi Anggaran telah banyak dilakukan sebelumnya, namun sebagian besar penelitian hanya berfokus pada periode tertentu atau menggunakan indikator analisis yang terbatas. Selain itu, penelitian yang membahas kinerja keuangan Pemerintah Kota Depok periode 2021–2024 masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk dilakukan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi keuangan Pemerintah Kota Depok berdasarkan analisis Laporan Realisasi Anggaran.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahas mengenai analisis realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penelitian ini berjudul “Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Depok Tahun 2021–2024” Dari penelitian ini diharapkan diperoleh informasi mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kota Depok berdasarkan analisis Laporan Realisasi Anggaran, sehingga dapat membantu pemerintah daerah dalam mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pengelolaan APBD, mengidentifikasi tingkat kemandirian keuangan daerah, serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

2. KAJIAN TEORITIS

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan rekaman informasi dari suatu entitas dalam periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja entitas tersebut. (Leunupun et al., 2022). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah laporan yang menyajikan informasi tentang keuangan pemerintah daerah selama periode anggaran dan dirancang untuk memberikan gambaran tentang kinerja dan kondisi keuangan pemerintah daerah. LKPD dirancang untuk memberikan informasi yang relevan tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas pemerintah daerah yang dapat digunakan oleh berbagai pihak terkait sebagai dasar dalam mengambil keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Laporan keuangan dalam pemerintah daerah disajikan agar dapat mencukupi kebutuhan pemakai laporan keuangan sehingga daya banding laporan keuangan dengan anggaran antar periode dan unit dapat ditingkatkan. Menurut (Fu'ad & Sambharakreshna, 2024) Komponen laporan keuangan pemerintah daerah meliputi LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah juga berperan sebagai sarana untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik. (Nurhasani et al., 2026).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran adalah pernyataan tentang perhitungan kinerja yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah cara atau metode untuk membuat anggaran (Mardiasmo, 2018). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun untuk mengelola dan mengatur pendapatan dan belanja daerah, dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah. APBD berperan penting dalam memberikan pelayanan publik serta pencapaian tujuan pembangunan daerah. Menurut (Edtiyarsih & Izzabillah, 2023) dalam APBD secara nasional di Indonesia, pendapatan daerah dibagi menjadi tiga bagian: a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan yang berasal dari sumber-sumber ekonomi di daerah itu sendiri. Ini termasuk pajak daerah, retribusi daerah, hasil usaha daerah, dan lain-lain. b. Dana Perimbangan, Dana yang diterima oleh pemerintah daerah yang dikelola oleh pemerintah pusat. Untuk menjaga keseimbangan antar daerah dan menjamin bahwa setiap daerah memiliki sumber daya yang cukup untuk membiayai pelayanan dasar dan pembangunan, dana ini dialokasikan. c. Pendapatan Daerah Lain yang Sah, Termasuk Pendapatan Bukan PAD dan Dana Perimbangan Ini mencakup berbagai sumber pendapatan lainnya, seperti hibah dan hasil penjualan aset.

Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran. Klasifikasi menurut kelompok belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung dan tidak langsung termasuk dalam kategori ini berdasarkan kelompoknya. Belanja diklasifikasikan berdasarkan hubungannya dengan program atau kegiatan. Belanja yang berkaitan langsung dengan program atau kegiatan, seperti honorarium, barang, dan modal, dikategorikan sebagai belanja bulatan teknis penyajian dan pengungkapan pemerintah langsung. Belanja yang tidak berkaitan langsung dengan program atau kegiatan, seperti gaji dan tunjangan pegawai bulanan, dikategorikan sebagai belanja bulatan teknis penyajian dan pengungkapan pemerintah langsung. (Kurniati & Devi, 2022).

APBD berfungsi sebagai alat untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan publik dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dalam kerangka otonomi daerah, APBD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. (Zafnil, 2026).

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan bagaimana sumber daya keuangan yang dikelola pemerintah daerah digunakan, dialokasikan, dan digunakan, dan menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya selama periode pelaporan tertentu. (Rosalia, 2022). Menurut (Amelia et al., 2023) pendapatan LRA adalah pendapatan bendahara yang menambah dana anggaran selama periode anggaran yang berlaku. Tanda terima ini ditanggihkan dan tidak perlu dikembalikan. Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan pendapatan lain yang sah merupakan komponen pendapatan LRA. Pengeluaran adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh Bendahara yang mengakibatkan berkurangnya saldo pada periode anggaran yang bersangkutan. Pembelian diperlukan dan tidak dapat dikembalikan. Biaya termasuk biaya operasional, biaya modal, dan biaya kontinjensi. Pengeluaran atau pendapatan keuangan yang dijelaskan lebih rinci disebut transfer. Ini mencakup dana campuran dan reksa dana. Pada dasarnya, pengeluaran pemerintah pusat dan daerah termasuk transfer. Pengeluaran atau pendapatan yang harus dibayar kembali atau ditarik untuk menutupi kerugian atau penggunaan anggaran yang berlebihan disebut pendanaan.

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah yang baik menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah mengelola anggaran dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung

pembangunan. Pengukuran kinerja di sektor publik dilakukan dengan tujuan yang terdiri dari tiga aspek. Pertama, pengukuran ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Ukuran kinerja diharapkan dapat membantu pemerintah fokus pada tujuan dan sasaran dari program yang dijalankan oleh unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan efisiensi serta efektivitas organisasi di sektor publik dalam memberikan layanan. Kedua, ukuran kinerja di sektor publik juga digunakan dalam proses pengalokasian sumber daya dan pengambilan keputusan. Ketiga, pengukuran kinerja di sektor publik bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas publik sekaligus memperbaiki komunikasi antar lembaga (Purba & Silitonga, 2022).

Rasio Efektivitas

Efektivitas merupakan sebuah tolak ukur seberapa baik suatu pekerjaan dilakukan (Kuntadi & Rosdiana, 2022). Menurut (Halim & Muhammad, 2019) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat pertanggungjawaban dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapainya. Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kinerja pemerintah daerah (Ratu & Adityaputra, 2025). Rasio ini dihitung dengan membandingkan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\% \dots\dots\dots (i)$$

Tabel 1. Kriteria Rasio Efektifitas.

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria Efektivitas
>100%	Sangat Efektif
90%-99%	Efektif
75%-89%	Cukup Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: (Hadinata et al., 2024)

Rasio Efisiensi

Efisiensi merupakan salah satu cara perusahaan dalam mengelola sumber keuangan, material, proses, peralatan, tenaga kerja maupun biaya secara efektif (Dua & Rumerung, 2022). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dianggap efisien jika mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya atau jika mampu mengeluarkan uang dengan cara yang bijak (Mahmudi, 2019). Rasio efisiensi adalah rasio yang membandingkan antara input yang digunakan terhadap output yang dihasilkan (Halim & Kusufi, 2019). Rasio efisiensi menyajikan data mengenai total pengeluaran yang dilakukan dibandingkan dengan total

pendapatan yang diperoleh. Apabila rasio yang diperoleh berada di bawah 100%, maka hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah tersebut efektif. Rasio efisiensi yang lebih kecil menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah semakin baik. Rasio ini dihitung dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran belanja. Berikut rumus yang digunakan.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\% \dots \dots \dots (ii)$$

Tabel 2. Kriteria Rasio Efisiensi.

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria Efisiensi
>100%	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber: (Hadinata et al., 2024)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bersifat kuantitatif untuk menguji hipotesis melalui analisis data keuangan. Menurut (Sugiyono, 2020) Metode kuantitatif, yang didasarkan pada positivisme, bertujuan untuk menggambarkan dan mengevaluasi hipotesis para peneliti. Penelitian kuantitatif memuat banyak angka-angka mulai dari pengumpulan, pengolahan, serta hasil yang didominasi angka. Sementara deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai kondisi suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala sebagaimana adanya saat penelitian dilakukan (Acnes, Djuadi, D., 2022).

Objek yang dianalisis dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran dari Pemerintah Kota Depok untuk periode 2021 hingga 2024. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai kondisi keuangan Pemerintah Kota Depok berdasarkan laporan realisasi anggaran selama periode 2021 hingga 2024 dengan menghitung berbagai rasio keuangan, terutama rasio efektivitas dan efisiensi. Metode yang diambil adalah deskriptif kuantitatif untuk mengevaluasi kinerja keuangan Kota Depok. Proses analisis melibatkan pemeriksaan laporan-laporan keuangan, perhitungan rasio, perbandingan, dan penilaian akhir yang bertujuan untuk merangkum keadaan keuangan Kota Depok. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, dengan fokus pada dokumen Laporan Realisasi Anggaran Kota Depok. Data yang digunakan berbentuk time series, dengan rentang waktu pelaporan dari tahun 2021 hingga 2024. Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi rasio efektivitas serta rasio efisiensi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Efektivitas

Kemampuan Pemerintah Kota Depok untuk mencapai PAD yang direncanakan dan target dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah. Rasio efektivitas merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara realisasi penerimaan PAD dan target penerimaan PAD dalam satu konteks anggaran. Dalam konteks pengukuran kinerja, rasio ini menunjukkan seberapa besar kemampuan daerah dalam mengelola, menggali, dan memanfaatkan potensi pendapatan internalnya untuk membiayai pembangunan. Semakin besar rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut dalam mewujudkan kemandirian fiskal.

Tabel 3. Rasio Efektivitas Kota Depok Tahun 2021-2024.

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD	Target Penerimaan PAD	Rasio (%)	Keterangan
2021	Rp.1.153.968.635.023	Rp.1.349.600.629.760	85%	Cukup Efektif
2022	Rp.1.642.228.601.282	Rp.1.543.043.585.869	106%	Sangat Efektif
2023	Rp.1.753.005.474.073	Rp.1.740.007.778.309	100%	Sangat Efektif
2024	Rp.1.885.343.551.745	Rp.1.752.829.267.641	107%	Sangat Efektif

Sumber: depokkota.bps.go.id

Berdasarkan data tabel diatas, rasio efektifitas diperoleh dari perbandingan antara realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target PAD yang telah ditetapkan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Depok dalam meningkatkan PAD selama periode 2021-2024 mengalami perkembangan yang cukup baik. Hal ini terlihat dari peningkatan rasio efektivitas yang pada awalnya berada pada kategori cukup efektif, kemudian meningkat menjadi sangat efektif pada tahun-tahun berikutnya.

Pada Tahun 2021, target PAD Kota Depok ditetapkan sebesar Rp. 1,34 Triliun, sedangkan realisasi penerimaan mencapai Rp. 1,15 Triliun. Dengan demikian, rasio efektivitas yang diperoleh sebesar 85,50% dan termasuk dalam kategori Cukup Efektif. Capaian tersebut masih dipengaruhi oleh kondisi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, sehingga beberapa sektor penyumbang PAD belum dapat beroperasi secara optimal. Selanjutnya pada tahun 2022, kinerja PAD mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Target penerimaan sebesar Rp. 1,54 Triliun berhasil direalisasikan sebesar Rp. 1,64 Triliun. Hal ini menghasilkan rasio efektivitas sebesar 106,43% yang termasuk kategori Sangat Efektif. Peningkatan tersebut didorong oleh mulai pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pada sektor pajak seperti pajak restoran, hotel, hiburan, BPHTB. Pada tahun 2023, capaian PAD Kota Depok tetap menunjukkan hasil yang baik. Dari target sebesar Rp. 1,74 Triliun, realisasi penerimaan mencapai Rp. 1,75 Triliun. Rasio efektivitas yang diperoleh sebesar

100,745% dan masi pada kategori Sangat Efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mempertahankan kinerja penerimaan PAD secara optimal. Kemudian pada tahun 2024, rasio efektivitas PAD mencapai angka tertinggi selama periode penelitian, yaitu sebesar 107,56%. Target PAD sebesar Rp. 1,75 Trilliun dapat direalisasikan sebesar Rp. 1,88 Trilliun. Tingginya capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan PAD Kota Depok semakin baik melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, serta penerapan sistem pemungutan berbasis digital yang semakin efektif.

Rasio Efisiensi

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah dapat dilakukan dengan menganalisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan rasio efisiensi. Dalam konteks pengukuran kinerja, rasio ini menunjukkan seberapa optimal pemerintah Kota Depok dalam menggunakan sumber daya keuangan yang tersedia untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Semakin rendah rasio efisiensi, semakin baik keuangan pemerintah daerah.

Tabel 4. Rasio Efisiensi Kota Depok Tahun 2022–2024.

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Rasio (%)	Keterangan
2021	Rp3.267.620.863.000	Rp3.396.023.758.000	96%	Cukup Efisien
2022	Rp3.614.127.822.000	Rp3.664.657.171.000	98%	Cukup Efisien
2023	Rp3.947.363.970.363	Rp3.794.214.900.049	104%	Tidak Efisien
2024	Rp4.152.443.276.595	Rp4.208.877.888.140	98%	Cukup Efisien

Sumber: depokkota.bps.go.id

Berdasarkan data pada tabel, rasio efisiensi dihitung dengan membandingkan realisasi belanja terhadap realisasi pendapatan daerah, pada tahun 2021 dan 2022 keuangan Kota Depok berada dalam kondisi yang cukup efisien. Pada tahun 2021, dengan realisasi belanja sebesar Rp3,26 triliun dan pendapatan sebesar Rp3,39 triliun, rasio efisiensi tercatat sebesar 96%. Angka ini sedikit meningkat menjadi 98% pada tahun 2022 karena pertumbuhan belanja berjalan beriringan dengan kenaikan pendapatan.

Pada dua tahun pertama ini, pengelolaan anggaran dinilai cukup baik karena pengeluaran daerah tetap terkendali di bawah total pendapatan yang masuk. Namun, performa tersebut mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2023, di mana rasio efisiensi melonjak hingga 104% dan masuk dalam kategori tidak efisien. Hal ini terjadi karena realisasi belanja yang mencapai Rp3,94 triliun justru lebih besar daripada realisasi pendapatan yang hanya sebesar Rp3,79 triliun.

Sementara itu, pada tahun 2024 kondisi efisiensi kembali membaik. Realisasi belanja tercatat sebesar Rp4,15 triliun dan pendapatan sebesar Rp4,20 triliun. Rasio efisiensi turun menjadi 98% dan kembali masuk kategori “cukup efisien”. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil mengendalikan pengeluaran agar tidak melampaui pendapatan, meskipun tingkat efisiensinya masih belum optimal karena rasio masih mendekati 100%.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Depok periode 2021–2024, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah menunjukkan hasil yang cukup baik. Dari sisi efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kota Depok berhasil meningkatkan realisasi pendapatan setiap tahunnya. Rasio efektivitas yang tercatat pada tahun 2021 berada dalam kategori cukup efektif sebesar 85%, meningkat menjadi sangat efektif pada tahun 2022 hingga 2024 dengan rasio masing-masing sebesar 106%, 100%, dan 107%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Depok memiliki kemampuan yang signifikan dalam mencapai target PAD yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut mencerminkan semakin optimalnya pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah serta meningkatnya kapasitas fiskal daerah.

Sementara itu, dari sisi efisiensi, secara umum kinerja keuangan Pemerintah Kota Depok berada dalam kategori cukup efisien. Rasio efisiensi pada tahun 2021, 2022, dan 2024 masing-masing sebesar 96%, 98%, dan 98%, yang menunjukkan bahwa pengeluaran daerah masih dapat dikendalikan sesuai dengan kemampuan pendapatan yang dimiliki. Namun, pada tahun 2023 rasio efisiensi melonjak menjadi 104% sehingga dinyatakan dalam kategori tidak efisien karena realisasi belanja lebih besar dibandingkan realisasi pendapatan. Meskipun demikian, kondisi tersebut berhasil diperbaiki pada tahun 2024. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Depok telah mampu mengelola keuangan daerah dengan baik, terutama dalam meningkatkan efektivitas penerimaan PAD, meskipun masih dibutuhkan usaha lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan belanja daerah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan Pemerintah Kota Depok untuk terus mempertahankan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah melalui pengoptimalkan potensi pajak dan retribusi daerah, peningkatan kualitas pelayanan bagi wajib pajak, serta penerapan sistem digital dalam proses pemungutan pendapatan. Langkah tersebut

diharapkan dapat menjaga tren peningkatan PAD dan memperkuat kemandirian keuangan daerah di masa mendatang. Selain itu, pemerintah daerah perlu lebih memperhatikan aspek efisiensi anggaran, khususnya dalam pengendalian belanja daerah agar tidak melampaui kapasitas pendapatan yang tersedia. Perencanaan dan pengawasan anggaran perlu dilakukan secara lebih cermat sehingga penggunaan anggaran dapat lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk tidak hanya menggunakan rasio efektivitas dan efisiensi, tetapi juga menambahkan analisis rasio keuangan daerah lainnya, seperti rasio kemandirian, rasio pertumbuhan, dan rasio keserasian belanja, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Acnes, Djuadi, D., & H. (2022). Analisis metode pengakuan pendapatan perusahaan jasa konstruksi untuk mengetahui laba rugi dalam laporan keuangan CV Asia Konstruksi. *Jurnal Vokasi Akuntansi*, 1(1), 79–94.
- Amelia, P. S., Nursyabani, D., & Bharata, R. W. (2023). Analisis kinerja belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun anggaran 2019–2021. *Jurnal*, 12(2), 308–313.
- Atiyyah, S., & Fitria, L. (2024). Laporan realisasi anggaran terhadap kinerja keuangan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai. *Jurnal*, 4, 11543–11553.
- Cahyo, P. N. (2024). Analisis kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso tahun 2018–2022. *Jurnal*, 9(2), 214–223.
- Dua, I. L., & Rumerung, J. J. (2022). Kajian efisiensi dan efektivitas kerja karyawan bidang administrasi pada PT. Manado Media Grafika. *Jurnal*, 4(1), 118–132.
- Edtiyarsih, D. D., & Izzabillah, N. (2023). Urgensi anggaran kas dalam mewujudkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang efisien pada bagian perekonomian dan administrasi pembangunan. *Jurnal*, 12(4), 368–382. <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v12i4.74800>
- Fu'ad, S., & Sambharakreshna, Y. (2024). Analisis penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk berdasarkan penerapan PP No. 71 Tahun 2010. *Jurnal*, 17(1), 17–30.
- Hadinata, D. F., Sitompul, F. M., Nainggolan, F. E., & Tambunan, N. N. (2024). Analisis rasio efektivitas dan rasio efisiensi keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Pematang Siantar. *Jurnal*, 2(2), 496–502.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2019). *Teori, konsep dan aplikasi akuntansi sektor publik*. Salemba Empat.
- Halim, A., & Muhammad, I. (2019). *Pengelolaan keuangan daerah*. UPP STIM YKPN.

- Kuntadi, C., & Rosdiana, D. (2022). Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penyerapan anggaran belanja pendidikan: Perencanaan anggaran, peraturan, koordinasi (literature review). *Jurnal*, 4(2), 142–152.
- Kurniati, H., & Devi, Y. (2022). Pengaruh flypaper effect pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja daerah Provinsi Lampung tahun 2016–2019 dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal*, 11(2), 187–208.
- Leunupun, P., Persulesy, G., & Souhuwat, M. Y. (2022). Pengelolaan keuangan, sistem akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal*, 6(3), 2364–2376.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen kinerja sektor publik* (Edisi 3). UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi revisi). Andi.
- Nurhasani, A., Setiawan, A. B., Julfani, D., Fauziah, F., Ariyansyah, H., & Talia, P. M. (2026). Analisis laporan realisasi anggaran untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2022–2024. *Jurnal*, 6(1), 42–51.
- Purba, P. Y., & Silitonga, A. A. (2022). Analisis rasio keuangan APBD untuk menilai kinerja keuangan daerah Kota Medan tahun 2016–2020. *Jurnal*, 4(1), 104–115.
- Ratu, V. M., & Adityaputra, S. A. (2025). Analisis kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Bogor tahun 2019–2023. *Jurnal*, 6(1), 113–129.
- Rosalia, H. (2022). Analisis efektivitas dan efisiensi anggaran belanja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Simeulue tahun 2018–2020. *Jurnal*, 6, 588–594.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Zafnil, M. I. (2026). Analisis efektivitas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2025. *Jurnal*, 2973–2981.